BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembelajaran Berdiferensiasi

1. Pengertian Pembelajaran Berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat meminimalkan potensi frustrasi serta perasaan gagal dalam pengalaman belajar mereka.[27]

Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memahami dan menyadari bahwa tidak terdapat satu pendekatan tunggal, baik dalam hal metode maupun strategi, yang efektif untuk mempelajari suatu materi pelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk merancang bahan ajar, aktivitas pembelajaran, serta tugas-tugas harian—baik yang dilaksanakan di kelas maupun di rumah—dan juga asesmen akhir yang selaras dengan tingkat kesiapan peserta didik, minat belajar mereka, serta profil belajar masing-masing, termasuk dalam menentukan cara penyampaian materi yang paling sesuai.[28]

Dengan demikian, dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat tiga aspek utama yang dapat dimodifikasi oleh guru guna membantu peserta didik memahami materi pembelajaran, yaitu aspek konten yang diajarkan, aspek proses berupa kegiatan pembelajaran bermakna yang dilakukan peserta didik di kelas, serta aspek asesmen yang diwujudkan melalui produk pada tahap akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.[29]

Pembelajaran berdiferensiasi berbeda dengan pembelajaran

---

[27] Peduk Rintayati, *Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).
[28] Ahmad Teguh Purnawanto, "Pembelajaran Berdiferensiasi," *Jurnal Ilmiah Pedagogy* 26, no. 1 (2023).
[29] Baktiar Nasution et al., "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," *Journal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 4, no. 2 (2023): 223–230.

individual yang umumnya diterapkan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam pendekatan berdiferensiasi, guru tidak memberikan pembelajaran secara khusus kepada setiap individu secara terpisah. Sebaliknya, peserta didik dapat belajar dalam berbagai pengelompokan, baik kelompok besar, kelompok kecil, maupun secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajar mereka.[30]

Meskipun konsep ini telah dibahas oleh berbagai tokoh pendidikan, tulisan ini secara khusus akan mengkaji gagasan dan kontribusi Carol Ann Tomlinson sebagai salah satu penggagas utama dalam pembelajaran berdiferensiasi.

2. Prinsip-prinsip kunci Pembelajaran Berdiferensiasi

Pembelajaran berdiferensiasi perlu dibangun melalui pola pikir guru yang meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Carol Ann Tomlinson dan Tamara Moon sebagai tokoh dalam pembelajaran berdiferensiasi menyatakan bahwa terdapat lima prinsip dasar yang dapat membantu guru dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut.

a. Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar mencakup lingkungan fisik sekolah dan kelas sebagai tempat peserta didik menghabiskan waktu dalam proses pembelajaran. Sementara itu, iklim belajar merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik selama belajar, termasuk dalam membangun relasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik maupun dengan guru.

Dalam proses pembelajaran, guru perlu memberikan respons yang sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik agar kebutuhan belajar mereka dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik guna

[30] Parlindungan Sitorus et al., "Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 2 Manduamas," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 2883–2890.

memahami karakteristik mereka, baik dari segi kesiapan dalam menerima materi, minat yang dapat mendukung proses belajar, maupun cara penyampaian yang paling efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing.[31]

Selain membangun relasi dan koneksi dengan peserta didik, guru juga perlu menumbuhkan kepercayaan peserta didik terhadap dirinya sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Hattie dalam Tomlinson menyatakan bahwa kepercayaan dari peserta didik diperoleh guru dengan cara:

1) memberikan respek yang benar terhadap nilai, kemampuan, dan tanggung jawab dari peserta didik;
2) memberikan optimisme kepada peserta didik bahwa mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mempelajari materi pelajaran yang diberikan;
3) aktif dan mendukung peserta didik secara nyata agar mereka dapat sukses.

b. Kurikulum yang berkualitas

Dalam kurikulum yang berkualitas, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas agar guru memiliki arah yang pasti mengenai capaian yang ingin dicapai pada akhir proses pembelajaran. Selain itu, fokus utama guru dalam mengajar seharusnya terletak pada pemahaman peserta didik, bukan sekadar pada penguasaan materi melalui hafalan. Dengan demikian, yang lebih diutamakan adalah bagaimana peserta didik mampu memahami materi secara mendalam sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[32]

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bagaimana kurikulum yang diterapkan mampu memberikan tantangan kepada seluruh peserta didik, baik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sedang,

---

[31] AZ Sarnoto, "Model Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka," *Journal on Education* 1, no. July (2024): 1–23.
[32] Aiman Faiz, Anis Pratama, and Imas Kurniawaty, "Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Program Guru Penggerak Pada Modul 2.1," *Jurnal Basicedu* 6, no. 2 (2022): 524–532.

maupun di bawah rata-rata. Bagi peserta didik dengan kemampuan di atas rata-rata, guru perlu memberikan tantangan berupa pemikiran yang lebih mendalam dan kompleks terkait materi yang dipelajari, sehingga mereka tetap termotivasi dan tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, bagi peserta didik yang berada di bawah rata-rata, guru perlu merancang langkah-langkah konkret yang sistematis untuk membantu mereka secara bertahap memahami materi pelajaran yang disampaikan, sehingga mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.

c. Asesmen berkelanjutan

Asesmen yang berkelanjutan merujuk pada praktik guru dalam melaksanakan asesmen formatif secara terus-menerus selama proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memperbaiki metode pengajaran dan menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang dibahas. Asesmen formatif ini tidak diberikan nilai numerik, melainkan berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami peserta didik, materi yang belum dipahami, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk membantu peserta didik meningkatkan pemahaman mereka.[33]

Asesmen formatif, selain berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kompetensinya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, umpan balik dan refleksi dialogis antara guru dan peserta didik dapat dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses belajar, sehingga kedua pihak dapat memahami dengan jelas apa yang telah dipelajari, dipahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik.

Asesmen yang berkelanjutan diawali dengan penerapan asesmen

[33] Mia Audina, Fenny Ayu Monia, and Mardiati, "Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP N 6 Lubuk Basung," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 615–621.

diagnostik pada awal pembelajaran. Tujuan dari asesmen awal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi atau bahan pelajaran yang akan dibahas, sehingga guru dapat merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan:

1) Meminta peserta didik untuk mengisi lembar KW. Pada kolom K (Know), guru menanyakan hal-hal yang telah diketahui peserta didik mengenai materi pelajaran yang akan dibahas. Selanjutnya, pada kolom W (Want to Know), peserta didik menuliskan hal-hal yang ingin mereka ketahui dari materi tersebut. Proses ini juga dapat dilengkapi dengan pertanyaan langsung dari guru untuk mengeksplorasi pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan.
2) Melakukan brainstorming bersama peserta didik sebelum memulai pelajaran dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Melalui rangkaian pertanyaan ini, guru dapat menilai tingkat kesiapan peserta didik dalam memahami materi tersebut dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih.
3) Memberikan pre tes kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari sehingga guru mengetahui kemampuan awal peserta didiknya.
4) Membuat kontrak belajar dimana masing-masing peserta didik menuliskan apa sumber bahan yang akan dipakai untuk mempelajari materi pelajaran, bagaimana ia akan mempelajari materi pelajaran, dan sampai sejauh mana ia mengetahui tentang bahan atau materi yang akan dipelajari.[34]

Selama proses pembelajaran, guru perlu mengamati cara peserta didik belajar, termasuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas atau memerlukan penjelasan ulang terhadap instruksi yang diberikan. Setelah pembelajaran selesai, guru melanjutkan dengan melakukan asesmen akhir. Asesmen ini dapat dilakukan melalui

[34] Ibid.

berbagai cara, misalnya dengan meminta peserta didik menuliskan hal-hal baru yang dipelajari, hal penting yang mereka peroleh, aspek yang masih kurang jelas, serta materi yang perlu diulang pada pertemuan berikutnya.

Guru juga dapat memberikan post-test singkat untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Hasil dari asesmen akhir ini membantu guru menentukan materi yang perlu diulang, strategi untuk mendukung peserta didik yang mengalami kesulitan, serta materi yang sudah dikuasai dan tidak memerlukan pengulangan. Asesmen ini bersifat diagnostik dan tidak diberikan nilai numerik, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja pengajaran dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.

d. Pengajaran yang responsif

Melalui asesmen akhir di setiap pembelajaran, guru dapat mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam membimbing peserta didik agar memahami materi yang diajarkan. Berdasarkan temuan tersebut, guru dapat memodifikasi rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi nyata di lapangan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif.

Karena kualitas pengajaran memiliki peran yang lebih penting dibandingkan kurikulum itu sendiri, guru perlu memberikan respons terhadap hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Respons ini diwujudkan dengan menyesuaikan materi dan strategi pada pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat kesiapan, minat, serta profil belajar peserta didik yang diperoleh melalui asesmen akhir.

e. Kepemimpinan dan Rutinitas di kelas

Guru yang efektif adalah guru yang mampu mengelola kelas secara baik. Kepemimpinan dalam konteks ini merujuk pada kemampuan guru untuk memimpin peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan tertib serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sementara itu, rutinitas kelas berkaitan dengan keterampilan guru dalam mengatur kelas melalui prosedur dan kebiasaan yang dijalankan peserta didik setiap hari,

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru misalnya:

1) Meletakkan materi dan bahan pelajaran yang dibutuhkan peserta didik dapat dengan mudah dijangkau.
2) Memberikan arahan yang jelas dalam setiap tugas yang harus dikerjakan peserta didik karena tidak semua peserta didik mengerjakan tugas yang sama.
3) Menjaga agar suara percakapan peserta didik yang sedang berdiskusi dalam kelompok tidak gaduh.
4) Menyediakan cara kepada peserta didik bagaimana meminta bantuan guru ketika guru sedang membantu peserta didik lainnya.
5) Menjelaskan kepada peserta didik apa yang mereka harus lakukan setelah mereka selesai mengerjakan tugas yang diberikan.
6) Mengatur bagaimana peserta didik tahu kapan harus membantu temannya yang kesulitan dalam pembelajaran.
7) Memberitahu peserta didik bagaimana meletakkan barang barang atau materi pelajaran yang sudah dipakai dengan teratur dan rapi.

3. Keragaman Peserta didik

Setiap individu diciptakan secara unik, sehingga tidak ada dua orang yang sama persis, termasuk meskipun mereka kembar, selalu terdapat perbedaan di antara mereka. Hal ini juga berlaku bagi peserta didik di kelas. Saat memasuki sekolah, mereka bukanlah lembaran kosong; setiap anak memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, yang perlu dikenali dan diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran. [35] Tomlinson menjelaskan keragaman peserta didik dipandang dari 3 aspek yang berbeda, yaitu:

a. Kesiapan

Kesiapan dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana kemampuan

[35] Rintayati, *Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi*.

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik agar mereka dapat berhasil dalam proses belajar. Penilaian terhadap kesiapan peserta didik harus selaras dengan pola pikir guru yang meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi untuk berkembang secara fisik, mental, dan intelektual. Selanjutnya, guru dapat menanyakan minat peserta didik untuk menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan preferensi serta motivasi mereka.

b. Minat

Minat memiliki peran penting sebagai motivator dalam proses belajar. Guru dapat menanyakan kepada peserta didik mengenai minat, hobi, atau mata pelajaran yang mereka sukai. Dengan demikian, peserta didik cenderung akan belajar dengan lebih tekun dan antusias terhadap materi yang sesuai dengan minat pribadi mereka.

c. Profil Belajar

Profil belajar peserta didik merujuk pada pendekatan atau cara yang paling efektif dan disukai oleh peserta didik agar mereka dapat memahami materi pelajaran dengan optimal. Beberapa peserta didik lebih menyukai belajar dalam kelompok besar, ada yang lebih nyaman belajar berpasangan atau dalam kelompok kecil, sementara yang lain lebih efektif belajar secara mandiri.

Selain itu, penggunaan panca indra juga memengaruhi proses belajar. Sebagian peserta didik belajar lebih baik melalui pendengaran (auditory), sebagian lain membutuhkan visualisasi berupa gambar atau tulisan, dan ada yang memahami materi melalui gerakan, baik sebagian maupun seluruh tubuh (kinestetik). Terdapat pula peserta didik yang belajar paling efektif dengan memegang atau menyentuh benda-benda yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga pengalaman fisik membantu pemahaman mereka.

4. Elemen yang Berdiferensiasi

Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat empat aspek yang berada dalam kendali guru, yaitu Konten**,** Proses**,** Produk, serta Lingkungan dan Iklim Belajar di kelas. Guru memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana keempat aspek tersebut dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menyesuaikan konten, proses, produk, serta lingkungan dan iklim belajar sesuai dengan profil peserta didik yang ada di kelas, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa.[36] Penjelasan keempat aspek ini adalah sebagai berikut:

a. Konten

Yang dimaksud dengan konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu:

1) Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik
2) Menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh peserta didik berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.

Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi konten yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah:

1) Menggunakan materi yang bervariasi
2) Menggunakan Kontrak Belajar
3) Menyediakan pembelajaran mini
4) Menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran
5) Menyediakan berbagai sistem yang mendukung

[36] Purnawanto, “Pembelajaran Berdiferensiasi.”

b. Proses

Yang dimaksud dengan proses dalam konteks ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan tersebut harus bermakna dan relevan dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga menjadi bagian dari pengalaman belajar yang efektif, bukan sekadar aktivitas yang tidak terkait dengan pelajaran. Penilaian terhadap kegiatan ini bersifat kualitatif, berupa catatan atau umpan balik dari guru mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, bukan penilaian kuantitatif dalam bentuk angka.[37]

Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang:

1) baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik.
2) berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya.

c. Produk

Produk dalam pembelajaran berdiferensiasi biasanya merupakan hasil akhir yang menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan materi selama satu semester. Produk bersifat **sumatif** dan perlu diberikan penilaian. Penyelesaian produk memerlukan waktu yang lebih lama dan menuntut pemahaman yang lebih luas serta mendalam dari peserta didik, sehingga seringkali pengerjaannya tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas.

Produk dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok. Jika dikerjakan secara kelompok, perlu diterapkan sistem penilaian yang adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam proses penyelesaian produk tersebut.

---

[37] Sitorus et al., "Pengaruh Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 2 Manduamas."

Berbeda dengan performance task/assessment, yang meskipun juga bersifat sumatif karena mencakup satu unit pelajaran, satu bab, atau satu tema dan perlu dinilai, asesmen ini umumnya diselesaikan di dalam kelas dengan waktu pengerjaan yang lebih singkat dibandingkan produk. Penekanan pada performance task adalah pada penerapan pengetahuan dan keterampilan secara langsung selama proses pembelajaran, sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang atau pengerjaan di luar kelas.

Guru merancang produk yang akan dikerjakan peserta didik berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus mereka tunjukkan. Selain itu, guru perlu menetapkan kriteria penilaian dalam rubrik sehingga peserta didik memahami aspek apa saja yang akan dinilai dan standar kualitas yang diharapkan pada setiap aspek tersebut. Guru juga perlu menjelaskan cara peserta didik mempresentasikan produknya, sehingga produk yang dihasilkan dapat dilihat dan dipahami oleh peserta didik lain. Produk yang dikerjakan peserta didik harus bersifat berdiferensiasi, disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar masing-masing peserta didik.[38]

d. Lingkungan belajar

Lingkungan belajar yang dimaksud mencakup pengaturan kelas dari segi personal, sosial, dan fisik. Lingkungan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik, minat, serta profil belajar mereka, sehingga dapat mendorong motivasi yang tinggi dan mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Sebagai contoh, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat duduk peserta didik yang ditempelkan di papan pengumuman kelas, disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Peserta didik dapat ditempatkan dalam kelompok besar, kelompok kecil, berpasangan, atau belajar secara individu, tergantung kebutuhan pembelajaran. Pengelompokan juga dapat didasarkan pada kesamaan minat,

[38] Ibid.

perbedaan atau kesamaan tingkat kesiapan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, guru perlu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan tenang, serta kebutuhan belajar mereka terpenuhi secara optimal.

B. Konsep Pendidikan Multikultural

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sebagai bagian dari pendidikan di sekolah memiliki dimensi yang luas. Di Indonesia, kebutuhan akan pendidikan multikultural telah lama menjadi wacana, namun dalam praktiknya guru seringkali memandang pengembangan prinsip multikultural hanya sebatas pengenalan keragaman budaya dan pentingnya menghormati perbedaan tersebut. Sejalan dengan hal ini, materi pembelajaran yang terkait biasanya meliputi penyajian keragaman adat istiadat, tarian, dan pakaian tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia.

Konsep pendidikan multikultural seperti yang digagas oleh Bank relevan untuk diterapkan saat ini dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dalam konteks penyederhanaan jumlah mata pelajaran pada Kurikulum 2013, pengintegrasian pendidikan multikultural ke dalam mata pelajaran terkait merupakan pendekatan yang paling tepat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan konsep kunci, prinsip, dan generalisasi dari disiplin ilmu terkait pendidikan multikultural tanpa mengganggu isi dan tuntutan kurikulum. Selain itu, proses integrasi ini juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan partisipatif peserta didik sebagai upaya membentuk sikap-sikap multikultural.[39]

Secara sederhana, multikultural dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa suatu negara atau masyarakat terdiri dari beragam dan majemuk kebudayaan. Tidak ada negara yang hanya memiliki satu kebudayaan nasional tunggal; dengan demikian, multikulturalisme merupakan suatu kenyataan (sunnatullah) yang tidak dapat dihindari bagi setiap bangsa di dunia.

---

[39] Isnarmi Moeis, Pendidikan Multikultural Transformatif Integritas Moral, Dialogis, dan Adil, (Padang: UNP Press, 2014), 47

Multikulturalisme bukanlah konsep yang sederhana, karena mengandung dua pengertian yang kompleks: multi, yang berarti plural atau beragam, dan kultural, yang berkaitan dengan kultur atau budaya. Konsep plural tidak hanya sekadar pengakuan atas keberagaman, tetapi juga membawa implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pluralisme memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena mengakui dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari struktur sosial dan pemerintahan yang demokratis.[40]

Pendidikan multikultural merupakan upaya untuk mengelola keragaman dalam konteks pendidikan formal maupun informal, termasuk melalui lokakarya, kuliah umum, diskusi, serta kegiatan budaya dan keagamaan, sebagai bagian dari penguatan kehidupan nasional yang harmonis dan bebas konflik. Dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah, semangat multikulturalisme—atau kemampuan untuk hidup bersama dalam keragaman—dapat dikembangkan melalui pengamatan, pemahaman, dan kegiatan lintas budaya yang menarik minat peserta didik.

Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah sesuatu yang otomatis ada (given), melainkan merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai yang berlangsung di dalam suatu komunitas.[41]

Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap meningkatnya keragaman penduduk sekolah sekaligus tuntutan akan persamaan hak bagi seluruh kelompok. Pendidikan ini dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan inklusif yang diberikan kepada semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, budaya, kelas sosial, agama, maupun kelompok lainnya.[42]

Dalam setiap kegiatan pendidikan, siswa merupakan obyek sekaligus subyek Pendidikan. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat pendidikan perlu dipahami karakteristik umum peserta didik, yaitu:

---

[40] H.A.R Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2014), 82.
[41] Ibid, 179.
[42] Muh Amin, Pendidikan Multikultural, Pilar, Vol. 9, No. 1 (2018), 24-34. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020/3342

1) Peserta didik sedang dalam keadaan berdaya untuk menggunakan keterampilan, kemauan, dan lain-lain.
2) Adanya kemauan untuk berkembang kearah dewasa.
3) Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang.
4) Peserta didik mengeksplorasi lingkungan alam dengan mengunakan kemampuan dasarnya.

2. Tujuan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam masyarakat modern, karena memungkinkan beragam suku bangsa dalam suatu negara bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera, di mana mereka dapat saling menghormati, saling membantu, dan hidup berdampingan secara harmonis. Pada hakikatnya, pendidikan multikultural diperlukan untuk memperluas wawasan individu, sehingga pemahaman dan apresiasi tidak hanya terbatas pada kelompok atau diri sendiri, tetapi juga mencakup pandangan dan pengalaman orang lain.

Tujuan pendidikan multikultural adalah mendorong penerimaan terhadap perbedaan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Pendidikan ini menekankan pentingnya pencerahan mengenai kebhinekaan (pluralitas), persamaan hak (equality), nilai-nilai kemanusiaan (humanity), keadilan (justice), serta prinsip-prinsip demokrasi (democratic values) sebagai dasar bagi berbagai aktivitas sosial.

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi:

1) Memperkuat peran sekolah dengan mempertimbangkan keberadaan siswa yang beragam;
2) Membantu siswa melakukan pendekatan positif terhadap perbedaan kelompok budaya, ras, etnis, dan agama;
3) Memberdayakan siswa dengan mengajarkan mereka untuk membuat keputusan dan mengembangkan keterampilan sosial;
4) Membantu siswa membangun ikatan lintas budaya dan mengajarkan gambaran positif tentang perbedaan kelompok.[43]

[43] Dj. Skeel, Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow‟s World, (New York: Harcount Brce College Publisher, 1995), 76.

3. Multikultural dalam Pendidikan Umum

Sebagai sebuah perspektif sekaligus gaya hidup, multikulturalisme merupakan gagasan yang sangat relevan dengan realitas masyarakat kontemporer. Prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap perbedaan merupakan nilai-nilai penting yang dibutuhkan manusia di tengah tekanan budaya global. Oleh karena itu, sebagai gerakan budaya, multikulturalisme menjadi bagian integral dari berbagai sistem budaya dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan melalui pendidikan yang berwawasan multikultural.

Menurut rumusan James A. Banks, pendidikan berwawasan multikultural adalah konsep atau ide berupa rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, serta kesempatan pendidikan bagi individu, kelompok, maupun negara.[44]

Pendidikan multikultural menawarkan alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang memanfaatkan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya keragaman yang dimiliki peserta didik, seperti etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, usia, dan ras. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan perbedaan sebagai sumber pembelajaran yang memperkaya pengalaman dan pemahaman peserta didik. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

Pertama, pendidikan multikultural secara inheren telah ada sejak terbentuknya bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, semangat gotong royong, saling membantu, dan saling menghargai, mencerminkan nilai-nilai multikultural yang melekat. Hal ini dapat dilihat dari kronologi sejarah bangsa Indonesia yang kaya dengan kedatangan berbagai suku bangsa asing yang kemudian berakulturasi dengan masyarakat pribumi, seperti etnis Tionghoa, Arab, Arya, Eropa, Afrika, dan sebagainya.

---

[44] James Banks, Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice, (USA: Review of Research in Education, 2013), 4.

Berbagai suku bangsa tersebut secara kultural mampu beradaptasi dengan suku-suku asli Indonesia, seperti Jawa, Batak, Minang, Bugis, Ambon, Papua, Dayak, dan Sunda. Proses adaptasi dan akulturasi yang terjadi antara suku-suku pribumi dengan etnis pendatang sebagian besar berlangsung secara damai, tanpa adanya penindasan yang signifikan. Proses inilah yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan multikultural. Namun, model pendidikan multikultural ini mengalami reduksi seiring masuknya kolonialisasi, yang tidak hanya memengaruhi politik dan ekonomi, tetapi juga mulai merambah ke bidang budaya dan peradaban bangsa.

Kedua, pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam menangani berbagai gejolak sosial yang terjadi akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural senantiasa menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas, dan keragaman dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak memaksakan semua individu untuk menjadi sama dalam hal kepribadian, intelektual, atau kepercayaan, melainkan menghargai perbedaan sebagai bagian dari keberagaman yang memperkaya kehidupan bersama.

Ketiga, pendidikan multikultural menolak pendekatan pendidikan yang berorientasi pada bisnis. Saat ini, banyak lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, berlomba-lomba menjadikan institusinya sebagai sumber pendapatan dengan alasan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik. Padahal, pendidikan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata pendidikan keterampilan, melainkan pendidikan yang mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan, yang dikenal sebagai **kecerdasan ganda (multiple intelligences)**, sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara holistik sesuai potensi masing-masing.

Keempat, pendidikan multikultural berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap fanatisme yang dapat mengarah pada berbagai jenis kekerasan. Kekerasan biasanya muncul ketika saluran untuk mencapai kedamaian telah terputus, sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan masyarakat yang tidak terselesaikan secara tuntas dan tanpa adanya sikap saling menerima. Penyelesaian yang tuntas

atas berbagai masalah sosial merupakan prasyarat bagi terciptanya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga dapat memicu kekerasan, dan dimensi fanatisme ini bisa meliputi etnis, bahasa, suku, agama, bahkan sistem pemikiran dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dikaji dan direnungkan kembali oleh para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan **model pendidikan multikultural**, yaitu pendidikan yang mampu mengakomodasi ribuan perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Model pendidikan ini diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu, pendidikan multikultural juga menekankan pengakuan dan penilaian terhadap pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, serta kesempatan pendidikan bagi individu, kelompok, maupun negara. Jenis pendidikan ini menentang segala bentuk rasisme dan diskriminasi, baik di sekolah maupun dalam masyarakat, dengan menanamkan penerimaan dan pemahaman terhadap pluralitas—meliputi etnis, ras, bahasa, agama, status ekonomi, gender, dan aspek lainnya—yang terefleksikan dalam interaksi antara peserta didik, komunitas mereka, dan para guru.[45]

Menurutnya, pendidikan multikultural harus terintegrasi dalam kurikulum dan strategi pengajaran, serta tercermin dalam setiap interaksi antara guru, peserta didik, dan keluarga, termasuk keseluruhan suasana belajar mengajar. Pendidikan jenis ini bersifat sebagai **pedagogi kritis** yang mendorong refleksi sekaligus menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat. Melalui pendidikan multikultural, prinsip-prinsip demokrasi dapat dikembangkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

4. Multikultural dalam Pendidikan Islam

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia,

[45] James A. Bank, Multicultural Education Issues and Perspectives, (USA: Review of Research in Education, 2007), 4.

disebabkan oleh keberagaman budaya dan luasnya wilayah geografisnya. Islam menekankan pentingnya multikulturalisme, karena agama ini mengakui perbedaan individu agar dapat hidup bersama secara harmonis dan saling menghormati. Menurut Mundzier, Islam merupakan agama universal yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan, serta mengakui keragaman dan pluralisme latar belakang budaya. Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang berisi pesan untuk membimbing umat manusia dalam menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah kehidupan yang multikultural.

Pertama, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dari satu asal, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya: sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.

Selanjutnya, Surat Al-Baqarah ayat 213 menjelaskan bahwa manusia pada awalnya adalah umat yang satu, namun setelah terjadi perselisihan, Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan menurunkan kitab yang benar untuk memberi keputusan atas perkara yang diperselisihkan manusia. Perselisihan tentang kitab terjadi karena adanya dengki dan ketidakpahaman di antara mereka. Dengan kehendak-Nya, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman untuk memahami kebenaran dalam perselisihan tersebut, dan selalu membimbing orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Penekanan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman umat manusia—dalam suku, bangsa, dan budaya—adalah bagian dari kehendak Allah, dan puncak kemuliaan manusia di sisi-Nya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh perbedaan identitas sosial atau budaya.[46]

Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW menekankan prinsip multikultural dan persaudaraan antarumat manusia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa semua hamba Allah adalah bersaudara, yang

[46] Khairiah, Multikultural Dalam Pendidikan Islam, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2020), 54-55.

berarti: “Takutlah terhadap prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan. Janganlah mencari-cari aib orang lain, mendengki, membenci, atau saling bermusuhan. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.”

Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada keutamaan seseorang berdasarkan asal-usulnya, baik Arab maupun non-Arab. Semua suku bangsa, baik dari Amerika, Asia, maupun Eropa, terlepas dari warna kulit, adalah sederajat di hadapan Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan: “Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan itu satu dan bapak serta ibu kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab terhadap Arab, kecuali melalui ketaqwaannya.”

Hadis-hadis ini menegaskan nilai kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pentingnya ketaqwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia, yang menjadi dasar pendidikan multikultural dalam konteks Islam.[47]

5. Relevansi Pendidikan Multikultural dengan Tujuan Pendidikan Islam

Keanekaragaman dan keragaman budaya merupakan fenomena yang tak terelakkan. Kita hidup dalam lingkungan yang beragam, yang memengaruhi semua aspek kehidupan, baik secara sadar maupun tidak, termasuk dalam ranah keimanan. Pluralisme agama—yang mencakup berbagai keyakinan dan praktik keagamaan—seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai ladang untuk membangun kerja sama dan sinergi antarumat manusia.

Kenyataannya, masyarakat terdiri dari berbagai agama dengan pengikut masing-masing, termasuk mereka yang tidak beragama atau tidak beriman. Oleh karena itu, sikap anti-pluralisme tidaklah tepat. Sebaliknya, kita dituntut untuk belajar bersikap toleran terhadap kemajemukan dan hidup berdasarkan semangat pluralisme agama, menghargai perbedaan, serta membina kerukunan di tengah keberagaman.[48]

---

[47] Ibid, 56.

[48] Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam, Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 1, (2013), 1-26, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/573/0.

6. Dimensi Pendidikan Multikultural

James Banks menjelaskan lima dimensi yang saling terkait dari pendidikan multikultural yang membantu guru menerapkan program yang mengatasi perbedaan siswa, yaitu:[49]

1) Integrasi Konten (Content Integration)**.** Dimensi ini digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi mengenai "poin-poin kunci" pembelajaran dengan meninjau materi dari berbagai perspektif. Secara khusus, guru mengintegrasikan isi materi ke dalam kurikulum dengan mempertimbangkan perspektif multikultural. Salah satu pendekatan yang umum adalah mengakui kontribusi berbagai kelompok, di mana guru menyertakan fakta-fakta tentang kepahlawanan dan prestasi dari berbagai kelompok budaya atau etnis. Meskipun rancangan pembelajaran dan unit belajar utama tetap sama, beberapa pendekatan memungkinkan guru menambahkan unit atau tema khusus yang menekankan materi multikultural.
2) Konstruksi Pengetahuan (Knowledge Construction)**.** Dimensi ini membantu peserta didik untuk memahami berbagai perspektif dan membentuk kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang mereka pelajari. Selain itu, dimensi ini mendorong peserta didik untuk menyadari dan merefleksikan perubahan dalam pemahaman mereka sendiri seiring dengan perkembangan pengetahuan yang diperoleh.
3) Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction)**.** Dimensi ini menekankan upaya guru untuk memastikan peserta didik memiliki sikap positif terhadap perbedaan antar kelompok. Misalnya, ketika siswa datang ke sekolah dengan persepsi negatif atau kesalahpahaman tentang ras, etnis, atau kelompok budaya lain, pendidikan multikultural dapat membantu mereka membangun pemahaman yang lebih positif dengan menciptakan kondisi belajar yang stabil dan konsisten. Dua aspek penting dalam dimensi ini

[49] James A. Banks, Multiethnic Education: Theory and Practice, (Boston: Allyn and Boston, 1994), 196

adalah: pertama, penggunaan bahan ajar yang menampilkan citra positif tentang perbedaan kelompok; kedua, penerapan bahan ajar tersebut secara berkesinambungan. Siswa yang membawa stereotip dan prasangka rentan terhadap perilaku negatif dan salah paham terhadap kelompok lain. Melalui buku teks multikultural, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran kolaboratif, peserta didik dapat mengembangkan sikap yang lebih inklusif dan kesadaran rasial yang positif. Strategi dan materi ini memungkinkan siswa belajar untuk bersikap adil dan menghormati kelompok ras, etnis, dan budaya lain.

4) Pendidikan yang Berkeadilan (Equitable Pedagogy). Dimensi ini menekankan bagaimana pengaturan pembelajaran dapat dimodifikasi untuk memfasilitasi pencapaian hasil belajar bagi beragam kelompok peserta didik. Strategi dan kegiatan pembelajaran yang mendukung keadilan pendidikan antara lain pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dan pembelajaran non-kompetitif (non-competitive learning). Tujuan dari dimensi ini adalah menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, di mana berbagai kelompok—termasuk suku, gender, dan peserta didik berkebutuhan khusus—mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara, hak yang sama, kesempatan belajar yang adil, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
5) Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial (Empowering School Culture and Social Structure). Dimensi ini menekankan pentingnya memperkuat budaya yang dibawa peserta didik ke sekolah dari berbagai kelompok. Selain itu, dimensi ini digunakan untuk mengembangkan struktur sosial sekolah yang memanfaatkan keberagaman budaya peserta didik sebagai bagian dari karakteristik sekolah lokal. Contohnya mencakup latihan kelompok, penciptaan iklim sosial yang inklusif, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta penghargaan atau pengakuan staf terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi lingkungan yang memberdayakan semua peserta didik sekaligus menghargai keberagaman budaya mereka.

7. Multikulturalisme untuk Masyarakat Majemuk

Suatu masyarakat dikatakan majemuk apabila memenuhi salah satu dari dua definisi berikut. Pertama, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas etnis yang berbeda, di mana setiap komunitas hidup secara terpisah dan memiliki sistem moralitasnya sendiri. Kedua, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dalam satu komunitas yang sama, tetapi terpisah oleh mekanisme pasar atau struktur ekonomi tertentu.

Pertanyaan penting yang muncul adalah: apakah masyarakat majemuk semacam ini akan mendorong terbentuknya moralitas bersama yang memungkinkan hidup berdampingan secara harmonis, atau justru menimbulkan relasi dominatif, di mana kelompok yang lebih kuat menekan kelompok yang lebih lemah, sehingga relasi dominatif inilah yang menjadi pengikat kehidupan bersama?

Salah satu sosiolog yang menganalisis fenomena ini adalah M. G. Smith. Menurutnya, masyarakat yang homogen cenderung memiliki seperangkat aturan sosial yang uniter, yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan privat, keagamaan, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, masyarakat majemuk tidak memiliki seperangkat aturan yang seragam. Masyarakat majemuk ditandai oleh keberagaman aturan nilai yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial, di mana setiap aturan nilai berlaku secara total hanya bagi anggota kelompok budaya atau agama tertentu. Dengan demikian, tidak ada satu norma tunggal yang menjadi acuan bagi seluruh masyarakat.[50]

Dalam masyarakat semacam ini, menurut **Smith**, tidak terdapat "sabuk pengikat" yang menyatukan kehidupan bersama. Justru yang menjaga eksistensi masyarakat majemuk adalah dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Dengan kata lain, elemen pengikat masyarakat majemuk seringkali bersifat hierarkis dan tidak egaliter.

Dalam konteks tersebut, Smith mengemukakan sebuah model untuk menjelaskan terjadinya diskriminasi rasial di masyarakat majemuk. Namun, model

[50] Reza A. A. Wattimena, Multikulturalisme untuk Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidispliner Teori Politik, Eksistensialisme, dan Psikologi Sosial), (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 61.

ini jelas bukan model ideal bagi pembentukan masyarakat multikultural yang inklusif.

. Untuk merumuskan model ideal masyarakat multikultural, langkah pertama adalah membedakan antara wilayah privat dan wilayah publik dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal ini, Rex menawarkan tiga model yang dapat digunakan sebagai kerangka pemahaman.

Pertama, kita dapat membayangkan masyarakat dengan ruang publik tunggal, namun mendorong perbedaan dalam ruang privat, di mana setiap individu atau kelompok dapat memelihara identitas dan nilai-nilainya sendiri secara personal atau komunitas.

Kedua, ada model masyarakat yang mendorong kesatuan baik di ruang publik maupun ruang privat, di mana kesatuan ini didasarkan pada seperangkat nilai moral yang disepakati bersama, sehingga tercipta kohesi sosial yang lebih menyeluruh.

Ketiga, model masyarakat dapat mengakui pluralitas nilai sekaligus di ruang publik dan ruang privat, artinya perbedaan budaya, keyakinan, dan norma dihormati secara terbuka, baik dalam interaksi sosial publik maupun kehidupan pribadi masing-masing individu atau kelompok.[51]

Menurut Rex, masyarakat multikultur yang ideal adalah yang sesuai dengan model pertama, di mana setiap individu maupun kelompok memiliki kebebasan mengekspresikan nilai, budaya, dan cara hidupnya di ruang privat, tetapi tetap terikat pada ruang publik bersama sebagai kesatuan sosial. Model ini berbeda dengan model kedua, yang diterapkan dalam praktik kolonialisme, seperti sistem Apartheid di Afrika Selatan, di mana dominasi satu kelompok membatasi kebebasan kelompok lain.

Rex menekankan bahwa refleksi mengenai ruang publik dan ruang privat masih jarang muncul dalam teori sosiologi klasik. Para pemikir klasik cenderung melihat masyarakat sebagai kumpulan institusi yang saling terhubung membentuk sistem tunggal**.** Pandangan semacam ini terlihat pada pemikiran Talcott Parsons,

[51] Ibid, 62.

serta pada para strukturalis Perancis seperti Althusser, yang memandang bahwa ruang publik dibentuk oleh moralitas bersama, dan moralitas ini sekaligus mengatur kehidupan ruang privat melalui institusi sosial, termasuk institusi agama.

Institusi-institusi sosial kontemporer pada dasarnya berlandaskan paradigma fungsionalis. Dalam konteks ini, sistem ekonomi dan sistem hukum telah terlepas dari nilai-nilai tradisional serta mengadopsi seperangkat nilai yang sepenuhnya baru. Meskipun demikian, nilai-nilai kultural dan keagamaan tradisional tidak serta-merta menghilang. Namun, praktik-praktik yang berakar pada nilai tradisional tidak diperkenankan untuk mengintervensi kinerja sistem sosial yang ada, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun hukum.

Lebih lanjut, teori-teori sosiologi klasik cenderung memusatkan analisisnya pada sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang berfungsi sebagai landasan moral dalam mengatur kehidupan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies, suatu masyarakat perlu mendasarkan kerja sama dan interaksi sosialnya pada fondasi yang bersifat historis.

Émile Durkheim mengemukakan konsep "solidaritas organik" (*organic solidarity*) yang berlandaskan pada pembagian kerja (*division of labour*). Ia membedakan konsep ini dari solidaritas mekanik yang umumnya ditemukan dalam masyarakat berskala kecil, yang didasarkan pada hubungan kekerabatan (*kinship*). Selain itu, solidaritas organik juga dibedakan dari pola masyarakat yang bersifat egoistik, di mana nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama hanya ditentukan oleh segelintir individu yang dominan.

Berbagai pandangan tersebut kemudian diperkaya oleh pemikiran Max Weber, yang menyatakan bahwa etika Protestan, khususnya Calvinisme, berkontribusi terhadap proses rasionalisasi dalam ranah keagamaan. Dalam kerangka ini, kehidupan sosial semakin bertumpu pada otoritas legal-rasional, menggantikan otoritas religius-metafisis.

Dengan demikian, proses perubahan sosial, pembentukan negara modern, serta perkembangan sistem ekonomi kapitalis dipandang sebagai hasil dari rasionalitas moral dan hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif Talcott Parsons, kondisi ini memungkinkan terwujudnya tatanan sosial yang mampu mencegah

terjadinya "perang semua melawan semua" dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, proses rasionalisasi dalam berbagai bidang kehidupan tidak berlangsung secara universal. Sebagaimana dirumuskan oleh J. S. Furnivall, pembentukan sistem negara modern dan sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan kehendak kolektif tidak terjadi di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, rasionalisasi justru berkaitan erat dengan proses kolonialisasi serta dominasi kekuatan-kekuatan Eropa terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di Eropa proses pembentukan sistem sosial berjalan seiring dengan perubahan kultural, sehingga tercipta kesinambungan yang relatif harmonis antara keduanya. Fenomena ini oleh John Rex disebut sebagai *kultur sivik* (*civic culture*). Kultur publik tersebut tercermin dalam moralitas, hukum, dan agama yang berlandaskan rasionalitas.

Kemunculan kultur publik ini sekaligus menandai meredupnya *kultur rakyat* (*folk culture*), yang sebelumnya termanifestasi dalam praktik moral, hukum, dan keagamaan tradisional. Selanjutnya, hukum, politik, dan moralitas yang berbasis rasionalitas tersebut memperoleh fungsi sosial yang baru dalam mengatur kehidupan masyarakat.[52]

8. Multikulturalisme dalam Pembelajaran

Multikulturalisme ialah suatu alat untuk meningkatkan derajat manusia. Secara alami atau kodrati, manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman budaya. Karena itu, pembangunan manusia harus memperhatikan keanekaragaman yang ada di tengah masyarakat. Hal itu tergambar secara nyata dan jelas dalam al-Qur"an, seperti firman Allah SWT, "Sekiranya Allah menghendaki niscaya ia menjadikan kamu (sekalian) satu umat, tetapi Dia hendak menguji kamu atas pemberianNya. Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali, maka ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (QS, Al-Maidah, 5:64)

Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah melibatkan peserta

[52] Ibid, 65.

didik yang sebagian besar berasal dari wilayah perkotaan dan sebagian lainnya dari pedesaan, dengan latar belakang budaya, etnis, dan bahasa yang beragam. Dalam perkembangan kontemporer, fenomena kekerasan di sekolah semakin sering terjadi. Tindakan seperti hukuman fisik oleh guru terhadap siswa, kasus pelecehan antara guru dan siswa maupun antarsiswa, hingga konflik antarsekolah yang berujung pada tawuran menunjukkan adanya permasalahan serius dalam lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbentuknya peserta didik yang kurang memiliki integritas moral, cenderung mudah terpancing emosi, serta mengalami degradasi dalam pembentukan kepribadian.[53]

Fenomena serupa juga kerap disaksikan melalui media televisi. Bahkan, penulis secara langsung menyaksikan dan mendengar kasus pelecehan antarsiswa di salah satu sekolah menengah di Aceh. Kondisi ini mencerminkan situasi yang memprihatinkan bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Dalam perspektif relasi yang tidak setara dan tidak egaliter dalam proses pendidikan, guru atau orang tua cenderung menempatkan diri sebagai subjek, sementara peserta didik diposisikan sebagai objek. Pola relasi semacam ini berpotensi melahirkan berbagai bentuk dehumanisasi, yakni tindakan yang mengabaikan atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Jika ditelusuri lebih mendalam, akar permasalahan tersebut berkaitan dengan praktik pendidikan yang masih bersifat diskriminatif, di mana proses pembelajaran belum sepenuhnya menghargai keberagaman sikap dan latar belakang peserta didik. Selain itu, terdapat indikasi rendahnya rasa keadilan yang dirasakan siswa, tingginya tingkat kemiskinan, serta menurunnya kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Proses pembelajaran juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan peserta didik, sementara lingkungan pendidikan masih belum sepenuhnya ramah anak.

Di sisi lain, sebagian besar guru, kepala sekolah, dan komite sekolah belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pendekatan pembelajaran multikultural. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya untuk

---

[53] Nurdin Hasan, Multikulturalisme: Menuju Pendidikan Berbasis Multikultur, (Aceh: Yayasan Anak Bangsa, 2011), 89.

mentransformasikan dan mengintegrasikan perspektif multikultural dalam praktik pendidikan di sekolah. Melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu mengenali dan menghargai keberagaman, serta memandang perbedaan sebagai sesuatu yang positif dan konstruktif.

Dengan demikian, pembelajaran berbasis multikultural dapat meningkatkan empati serta mengurangi prasangka antarsiswa, sehingga tercipta individu yang mampu menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan kemampuan kolaboratif peserta didik.[54]

9. Implikasi Pendidikan Multikultural di Sekolah

Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai serangkaian upaya edukatif yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam konteks keberagaman, baik yang mencakup ras, etnis, agama, budaya, nilai, maupun ideologi. Melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk hidup secara harmonis di tengah perbedaan, serta mengembangkan kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.[55]

Pendidikan multikultural berupaya mengarahkan peserta didik agar mampu menerima perbedaan, terbuka terhadap kritik, serta mengembangkan empati dan toleransi terhadap sesama tanpa memandang golongan, status sosial, gender, maupun kemampuan akademik. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mentransformasi proses pembelajaran agar memberikan kesempatan yang setara bagi setiap peserta didik, sehingga tidak ada pihak yang terpinggirkan.

Dalam kerangka tersebut, berbagai kelompok diharapkan dapat hidup secara damai, saling memahami, serta mengelola perbedaan tanpa menghilangkan orientasi pada tujuan bersama, yaitu terciptanya persatuan. Ketika peserta didik

---

[54] Ibid, 91

[55] Kasinyo Harto, Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 29.

berada dalam lingkungan dengan latar belakang yang beragam, mereka perlu belajar untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga mampu menerima perbedaan sebagai suatu nilai yang memperkaya pengalaman dan wawasan mereka.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu siswa:

1) Memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat;
2) Menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik;
3) Menyelesaikan sikap-sikap yang penuh prasangka; dan
4) Pendidikan multikultural juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai berbagai faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan historis yang berkontribusi terhadap munculnya polarisasi serta keterasingan etnis. Selain itu, pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah kondisi yang plural dan beragam.[56]

Pendidikan Multikultural dan implikasinya meliputi hal-hal berikut:

1) **Pendidikan multikultural sebagai ide** dapat dipahami sebagai suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keberagaman dalam masyarakat, mencakup kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak berkebutuhan khusus, agama, bahasa, serta usia, dalam membentuk identitas individu, kelompok, dan bangsa. Sebagai suatu ide, pendidikan multikultural bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan mengenai berbagai kelompok dan organisasi, sehingga materi ajar mencerminkan gagasan dari beragam budaya. Pendidikan ini menekankan kebebasan dalam mengeksplorasi perspektif dan budaya lain. Melalui eksplorasi tersebut, peserta didik memperoleh inspirasi dan menjadi lebih peka terhadap pluralitas cara hidup, termasuk dalam menganalisis pengalaman, ide, serta memandang temuan sejarah dari berbagai belahan dunia.
2) Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang

[56] Rustam Ibrahim, Pendidikan Multikultural, (Surakarta: Addin, 2013), 146.

mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen itu mencakup hal-hal berikut:

a) Nilai-nilai yang mendasari, artinya nilai-nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan;
b) Aturan prosedural, artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragam itu;
c) Kurikulum, artinya keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum. Artinya dibutuhkan penyusunan kurikulum yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kurikulum berperan mengembangkan kebudayaan daerah;
d) Bahan ajar, artinya materi multikultural itu harus tercermin dalam materi pelajaran, pada semua bidang studi. Multikultural bukan hanya diajarkan satu bidang studi melainkan lebih merupakan materi pelajaran yang bisa disisipkan pada semua bidang studi;
e) Struktur organisasi, artinya struktur organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi riil yang pluralistik; dan
f) Pola kebijakan artinya pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya.

3) Pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan multikultural merupakan suatu proses yang terus-menerus yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan dalam masyarakat.[57]

[57] Khairiah, Multikultural dalam Pendidikan Islam, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 111-112.